

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran kinerja sektor publik sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sektor publik memiliki peran yang tidak kecil dalam suatu negara yang dapat berdampak pada sektor lain yaitu sektor swasta, maupun sektor sosial. Di Indonesia jenis organisasi sektor publik yang dikenal antara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, institusi pendidikan dan Kesehatan serta tempat peribadatan. (Majid, 2019)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kondisi pendidikan di Indonesia secara umum masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain (Amin et al., 2020). Padahal, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala sektor kehidupan. Pendidikan yang semakin berkembang, diperlukan generasi muda yang dapat menanamkan kemampuan baru sebagai penerus pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu pilar kesejahteraan bangsa (Pramono, 2014). Sekolah menjadi salah satu organisasi sektor publik yang memberikan fasilitas berupa pelayanan pendidikan. Seiring berkembangnya zaman mendorong sekolah untuk mengembangkan kualitas pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu bentuk desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan yaitu dengan adanya kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah yang bertujuan untuk memandirikan sekolah dan secara luas dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah telah dilakukan pemerintah terutama dalam hal supervisi dan pengawasan. Sistem supervisi dalam pelaksanaan otonomi pendidikan tidak hanya mengemban fungsi pengawasan saja tetapi juga

fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan harus sejalan dengan fungsi manajemen lainnya agar peningkatan kinerja penyelenggara pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan tuntutan dalam pelaksanaan proses evaluasi yang lebih profesional, obyektif, jujur, dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan dan pembinaan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan kinerja dan meningkatkan kemampuan pengelolaan yang handal, terpercaya, dan akuntabel terhadap *stakeholders* yang membutuhkan.

Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban dengan membandingkan tolak ukur yang telah ditetapkan. Pada umumnya organisasi sektor swasta mengukur kinerja dengan tingkat laba, sedangkan pada sektor publik laba bukan merupakan tujuan utama. Sistem pengukuran kinerja dalam manajemen bukan dilihat dari aspek keuangan saja, karena masih ada aspek-aspek lain yang diperlukan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Maka dari itu, salah satu metode yang digunakan oleh organisasi sektor publik dalam mengukur kinerja yaitu Metode *Balanced Scorecard*.

Balanced Scorecard pertama kali dikemukakan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton (2000) yang menjelaskan bahwa penilaian kinerja entitas tidak hanya dari perspektif keuangannya saja, namun dilihat dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran dengan empat perspektif tersebut diharapkan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat memperhitungkan entitas sebagai fungsi yang komprehensif dan progresif.

SMA Negeri 2 Jember sebagai suatu organisasi pendidikan memiliki visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian visi, misi, dan tujuan tersebut tidak lepas dari peran seluruh sumber daya dan *stakeholder* yang ada sehingga diperlukan penilaian kinerja sekolah yang nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan pendidikan untuk memberikan kepuasan terhadap seluruh *stakeholder* nya. Penilaian kinerja yang selama ini dilakukan oleh sekolah tidak dilakukan secara menyeluruh melainkan hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja dengan adanya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). Oleh karena itu, perlu adanya penilaian kinerja yang lebih komprehensif dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah di sepakati bersama.

Faktor penghambat lain dari penilaian kinerja di SMA Negeri 2 Jember yaitu kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti adanya tenaga pendidik yang masih mengajar tidak sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Hal tersebut dapat mengurangi keefektifan dalam proses belajar mengajar. Penambahan tenaga pendidik diperlukan sehingga proses dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Jember.

Faktor keuangan juga menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja khususnya untuk mewujudkan inovasi-inovasi yang telah direncanakan. Masalah yang terjadi di sektor keuangan pada SMA Negeri 2 Jember yaitu besaran pendapatan dari sumber dana yang ada kurang mencukupi untuk operasional dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Orang tua siswa masih menganggap sekolah negeri tidak memungut biaya dalam kata lain masih beranggapan bahwa adanya sekolah gratis namun pada kenyataannya dana yang ada tidak memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengukuran kinerja sekolah SMA Negeri 2 Jember dengan pendekatan *Balanced Scorecard* untuk mendapatkan gambaran kinerja yang komprehensif dibandingkan dengan pengukuran kinerja yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Metode *Balanced Scorecard* pada SMA Negeri 2 Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis pengukuran kinerja dengan metode *balanced scorecard* pada SMA Negeri 2 Jember?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mampu menganalisis pengukuran kinerja dengan metode *balanced scorecard* pada SMA Negeri 2 Jember.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti
Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya mengenai pengukuran kinerja dengan metode *balanced scorecard*.
2. Bagi pihak sekolah
Dapat digunakan sebagai dasar penerapan strategi peningkatan kinerja dengan *balanced scorecard* dalam dunia pendidikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti hal yang sejenis sehingga dapat lebih mengembangkan variabel yang akan digunakan.